

# Prinsip Bebas-Aktif di Era Baru:

## *Apakah Indonesia Sedang Bergerak ke Multi-Alignment?*

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



*Rudy C Tarumingkeng* : *Prinsip Bebas-Aktif di Era Baru: Apakah  
Indonesia Sedang Bergerak ke Multi-Alignment?*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

4 Maret 2026

## **BEBAS-AKTIF DI ERA BARU: APAKAH INDONESIA SEDANG BERGERAK KE MULTI- ALIGNMENT?**

### **Pendahuluan**

Pertanyaan apakah Indonesia sedang bergerak dari doktrin **bebas-aktif** menuju **multi-alignment** merupakan salah satu pertanyaan paling penting dalam studi politik luar negeri Indonesia dewasa ini. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena sejak 2024–2026, Indonesia memperlihatkan pola diplomasi yang sangat padat, berlapis, dan tampak bergerak ke banyak arah sekaligus. Di satu sisi, Indonesia menegaskan keanggotaan penuh dalam **BRICS** dan kemudian memutuskan bergabung dengan **New Development Bank (NDB)**, dua langkah yang secara simbolik mengaitkan Indonesia dengan agenda reformasi tata kelola global dan solidaritas Global South. Di sisi lain, Indonesia juga mempercepat proses aksesi **OECD**, meminta akses ke **OECD Anti-Bribery Convention**, mencapai terobosan politik dalam **IEU-CEPA** dengan Uni Eropa, serta menegosiasikan kerangka perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Indonesia juga memperdalam kerja sama keamanan dengan Australia, melanjutkan latihan militer besar dengan Amerika Serikat dan banyak

Rudy C Tarumingkeng : Prinsip Bebas-Aktif di Era Baru: Apakah Indonesia Sedang Bergerak ke Multi-Alignment?

mitra Indo-Pasifik, serta tetap menempatkan **ASEAN centrality** dan **AOIP** sebagai kerangka utama regionalnya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang bergerak ke satu blok, melainkan memperluas jejaring strategisnya ke banyak platform sekaligus. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Namun, apakah perluasan jejaring ini berarti Indonesia telah meninggalkan bebas-aktif? Jawaban yang lebih cermat adalah: **tidak sepenuhnya**. Yang sedang terjadi bukanlah pembatalan atas bebas-aktif, melainkan **reoperasionalisasi** bebas-aktif dalam konteks dunia yang semakin multipolar, terfragmentasi, dan ditandai oleh kompetisi geoekonomi. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2025, pemerintah justru menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS adalah “wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri.” Dalam Pernyataan Pers Tahunan 2026, Kementerian Luar Negeri juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif tetap berangkat dari amanat konstitusi, sementara multilateralisme diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas ruang strategis Indonesia di tengah logika hard power yang menguat. Dengan demikian, dari sudut pandang resmi negara, multi-alignment bukan dipahami sebagai pengganti bebas-aktif, melainkan sebagai salah satu **metode kontemporer** untuk menjalankan bebas-aktif. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Di sinilah letak isu analitisnya. Secara normatif, Indonesia masih berbicara dengan bahasa bebas-aktif, kemandirian, tidak berpihak, dan kepentingan nasional. Akan tetapi, secara empiris, praktik diplomasi Indonesia memperlihatkan ciri-ciri yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai **partial multi-alignment**. Artikel akademik di *TRaNS* tahun 2025 secara eksplisit menyatakan bahwa konsepsi lama mengenai politik luar negeri Indonesia sebagai sekadar non-aligned tidak lagi sepenuhnya memadai; penulisnya berargumen bahwa Indonesia kini menjalankan strategi **multi-alignment parsial**, walaupun belum sampai pada bentuk

multi-alignment penuh karena keterbatasan daya nasional dan persepsi ancaman yang tetap kuat. Pandangan ini diperkuat oleh analisis lain yang menyatakan bahwa Indonesia perlu beralih dari non-alignment yang pasif menuju **active alignment**, yakni keterlibatan aktif dengan berbagai platform bilateral, minilateral, dan multilateral tanpa harus memilih satu kekuatan besar secara eksklusif. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Tulisan ini berargumen bahwa **Indonesia memang sedang bergerak ke multi-alignment, tetapi dalam bentuk yang selektif, terbatas, dan tetap dibungkus oleh bahasa bebas-aktif**. Pergeseran ini bukan berarti Indonesia hendak menjadi anggota blok tertentu, melainkan karena lingkungan strategis internasional sudah berubah sedemikian rupa sehingga netralitas pasif tidak lagi memadai. Dunia saat ini tidak lagi dibelah secara sederhana antara dua blok seperti era Perang Dingin, melainkan ditandai oleh pluralitas pusat kekuatan, tumpang tindih institusi, pertarungan standar teknologi, rivalitas rantai pasok, politik mineral kritis, tekanan tarif sepihak, dan fragmentasi perdagangan. Dokumen Renstra Kementerian Luar Negeri 2025–2029 sendiri mengakui adanya krisis geoekonomi, krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, serta maraknya kebijakan unilateral seperti tarif AS dan EUDR Uni Eropa. Dalam kondisi seperti itu, bebas-aktif yang efektif tidak cukup hanya berarti “tidak memihak”; ia juga harus berarti **mampu mengakses banyak kanal sekaligus tanpa kehilangan otonomi strategis**. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

### **Bebas-Aktif sebagai Dasar Historis dan Normatif**

Untuk memahami transformasi ini, kita perlu kembali ke makna dasar bebas-aktif. Dalam tradisi kebijakan luar negeri Indonesia, bebas-aktif tidak identik dengan netralitas pasif. “Bebas” berarti Indonesia tidak mengikatkan diri secara apriori pada salah satu kekuatan besar atau pakta kekuatan tertentu; sementara “aktif” berarti Indonesia tidak

*Rudy C Tarumingkeng : Prinsip Bebas-Aktif di Era Baru: Apakah Indonesia Sedang Bergerak ke Multi-Alignment?*

menarik diri dari percaturan internasional, melainkan ikut membentuk lingkungan regional dan global sesuai kepentingan nasional serta prinsip ketertiban dunia. Dalam Renstra Kementerian Luar Negeri 2025–2029 ditegaskan lagi bahwa diplomasi Indonesia diabdikan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan dalam melaksanakan amanat itu Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif. Dokumen yang sama juga menempatkan prioritas 2025–2029 pada diplomasi kedaulatan, diplomasi ekonomi Pancasila, peningkatan pengaruh kawasan dan global, perlindungan WNI, dan optimalisasi alat-alat diplomasi. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Jadi, secara normatif, bebas-aktif tetap menjadi **payung doktrinal**. Ia belum dicabut, belum direvisi, dan belum diganti. Bahkan, Kementerian Luar Negeri menegaskan relevansinya untuk era sekarang. Dalam salah satu bagian Renstra, disebutkan bahwa prinsip bebas aktif tetap relevan di tengah kontestasi kekuatan global, termasuk ketika Indonesia membangun kemitraan dengan kawasan Pasifik. Ini penting, sebab menandakan bahwa negara membaca bebas-aktif bukan sebagai doktrin yang usang, melainkan sebagai kerangka yang cukup lentur untuk menavigasi lingkungan baru. Fleksibilitas inilah yang membuat bebas-aktif bertahan lintas rezim: dari masa Sukarno, Orde Baru, era reformasi, hingga pemerintahan sekarang. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Akan tetapi, kelenturan itu juga menimbulkan persoalan interpretasi. Pada masa Perang Dingin, bebas-aktif relatif mudah dibaca sebagai sikap tidak bergabung dengan blok Barat atau blok Timur. Kini, konteksnya lebih rumit. Indonesia menghadapi Amerika Serikat yang tetap dominan dalam keamanan, dolar, dan teknologi; China yang sangat sentral bagi perdagangan, investasi, dan industrialisasi mineral; Uni Eropa yang menentukan banyak standar keberlanjutan dan akses pasar; India yang kian penting dalam manufaktur, maritim, dan Global South; Australia yang vital bagi stabilitas maritim dan pertahanan kawasan; serta ASEAN

yang tetap menjadi jangkar legitimasi regional Indonesia. Karena ancaman dan peluang datang dari banyak pusat sekaligus, maka bebas-aktif di era baru cenderung diterjemahkan sebagai **kemampuan untuk bekerja dengan semua, tanpa tunduk pada satu**. Itulah basis logis mengapa multi-alignment mulai tampak sebagai bentuk praksis yang masuk akal. ([Chatham House](#))

### **Dari Non-Alignment ke Multi-Alignment: Penjelasan Konseptual**

Secara konseptual, penting membedakan empat istilah: **non-alignment**, **neutrality**, **hedging**, dan **multi-alignment**. Non-alignment adalah posisi politik untuk tidak mengikatkan diri pada blok besar. Neutrality biasanya terkait dengan status hukum atau pilihan untuk tidak ikut dalam konflik tertentu. Hedging adalah strategi mengurangi risiko dengan menyeimbangkan hubungan terhadap beberapa kekuatan yang saling bersaing. Adapun multi-alignment, dalam pengertian kontemporer, berarti negara secara sengaja membangun hubungan substantif dengan banyak pusat kekuatan, termasuk yang satu sama lain saling berkompetisi, tanpa komitmen eksklusif yang memaksa negara memilih satu kubu. Artikel Cambridge tahun 2025 tentang Indonesia menyatakan bahwa kecenderungan regional dan global Indonesia sekarang mencakup diversifikasi keterlibatan multilateral melampaui ASEAN, penguatan berbagai bentuk kemitraan strategis dengan kekuatan-kekuatan Indo-Pasifik, dan bentuk hedging normatif pada isu-isu sensitif; itulah dasar argumen bahwa Indonesia kini menerapkan **partial multi-alignment strategy**. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Dalam kerangka ini, multi-alignment bukan lawan dari bebas-aktif. Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa **multi-alignment merupakan teknik operasional bebas-aktif dalam sistem multipolar**. Jika dulu bebas-aktif dijalankan dengan menjaga jarak terhadap dua blok, maka kini ia dijalankan dengan cara memasuki banyak forum sekaligus,

memperluas opsi, mencegah ketergantungan tunggal, dan memaksimalkan bargaining position. Analisis Belfer Center tahun 2025 bahkan mendorong Indonesia bergerak dari nonalignment yang “tanpa strategi” menuju **active alignment**, yaitu secara aktif mempertemukan dan mengelola relasi dengan Amerika Serikat dan China melalui berbagai platform bilateral, minilateral, dan multilateral, bukan untuk memilih salah satu, tetapi agar keduanya lebih sejalan dengan kepentingan Indonesia. Bahasa “active alignment” ini memang berbeda dari “multi-alignment”, tetapi arahnya serupa: Indonesia tidak lagi cukup hanya menolak berpihak; Indonesia harus **mengorkestrasi banyak keterhubungan** demi kepentingannya sendiri. ([Belfer Center](#))

Di titik ini, kita bisa melihat adanya pergeseran dari logika “tidak bergabung” ke logika “bergabung dengan banyak, tanpa terikat secara eksklusif”. Pergeseran ini tidak selalu diumumkan secara eksplisit, tetapi tampak pada perilaku institusional negara. Justru karena sistem internasional kini terfragmentasi dan forum-forum global tidak homogen, maka memilih untuk hanya bertahan pada satu jalur akan membuat Indonesia kehilangan peluang pembiayaan, perdagangan, teknologi, dan pengaruh normatif. Karena itu, multi-alignment bukan semata soal diplomasi simbolik, melainkan soal **arsitektur pilihan**. Negara yang memiliki banyak pintu masuk akan lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Ini sejalan dengan pandangan Chatham House bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada non-alignment dan ASEAN, tetapi semakin menyadari bahwa rivalitas AS–China menyempitkan opsi kebijakannya dan membuat pengelolaan otonomi strategis menjadi lebih sulit. ([Chatham House](#))

## **Bukti Empiris: Mengapa Banyak Pengamat Melihat Pergeseran?**

### **1. BRICS dan NDB: Pilar Global South**

Salah satu bukti paling menonjol adalah keputusan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS pada awal Januari 2025. Brazil sebagai ketua

*Rudy C Tarumingkeng : Prinsip Bebas-Aktif di Era Baru: Apakah Indonesia Sedang Bergerak ke Multi-Alignment?*

BRICS 2025 mengumumkan masuknya Indonesia sebagai anggota penuh, sementara Kementerian Luar Negeri RI menyambut keputusan tersebut. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro; Sekretariat Negara menegaskan bahwa kehadiran itu merupakan langkah penting menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategis global. Dalam forum itu pula Indonesia menekankan penguatan multilateralisme, isu ekonomi-keuangan, dan AI. Bagi banyak pengamat, langkah masuk ke BRICS jelas menunjukkan Indonesia ingin memperkuat posisinya di Global South dan ikut mendorong reformasi tata kelola global. Namun yang lebih penting, dari sudut pandang Jakarta, langkah ini dipresentasikan bukan sebagai anti-Barat, melainkan sebagai wujud bebas-aktif. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Keputusan bergabung dengan **New Development Bank** pada 25 Maret 2025 mempertegas orientasi tersebut. Presiden Prabowo menyebutnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemitraan pembangunan dengan negara berkembang dan lembaga multilateral. NDB sendiri mengonfirmasi bahwa Indonesia akan bergabung. Bila BRICS adalah forum politik-ekonomi yang berorientasi pada reformasi tata kelola global, maka NDB adalah instrumen finansial konkret yang dapat mendukung proyek-proyek transformasi ekonomi, energi, dan infrastruktur. Dalam bahasa geopolitik, Indonesia bukan sekadar hadir di forum, tetapi mulai memasuki **ekosistem kelembagaan** yang selama ini lebih diasosiasikan dengan poros Global South. ([Setneg](#))

Tetapi, penting dicatat: masuk BRICS dan NDB tidak otomatis berarti pivot ke China atau blok anti-Barat. Justru analisis ASPI pada Januari 2025 menyebut keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS bukan sebagai strategic pivot, melainkan kelanjutan strategi multi-alignment; buktinya, langkah itu berlangsung paralel dengan upaya bergabung ke OECD. Ini menegaskan bahwa Indonesia sedang bermain pada dua papan sekaligus: reformasi global governance dari sisi Global South, dan

peningkatan standar ekonomi-regulasi dari sisi negara-negara industri maju. ([The Strategist](#))

## 2. OECD: Kanal ke Tata Kelola Ekonomi Maju

Jika BRICS adalah sinyal keterbukaan Indonesia pada Global South, maka **OECD** adalah sinyal keterbukaan Indonesia pada standar ekonomi maju. Pada 3 Juni 2025, Indonesia menyerahkan **Initial Memorandum** kepada Sekretaris Jenderal OECD, menandai fase teknis komprehensif dalam proses akses. Pada saat yang sama, Indonesia juga mengajukan permintaan formal untuk bergabung dengan OECD Anti-Bribery Convention. OECD menyebut Indonesia sebagai pemain global yang signifikan dan melihat langkah ini sebagai pesan kuat tentang komitmen Indonesia untuk menyelaraskan legislasi, kebijakan, dan praktik dengan standar internasional dan best practices. ([OECD](#))

Secara simbolik, ini sangat penting. Negara yang benar-benar bergerak ke satu kubu biasanya akan berhati-hati untuk tidak terlihat terlalu dekat dengan perangkat normatif kubu lain. Indonesia justru melakukan hal sebaliknya. Ia tidak segan menjadi anggota BRICS sekaligus kandidat OECD. Kombinasi ini hanya masuk akal bila Indonesia memang sedang membangun **strategi berlapis**: mengambil manfaat dari solidaritas negara berkembang, sambil tetap mengejar kredibilitas regulasi dan ekonomi yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju pada 2045. Dalam konteks multi-alignment, inilah esensinya: **mengakses manfaat dari berbagai orbit institusional tanpa menyerahkan otonomi pilihan**. ([OECD](#))

## 3. Eropa, Amerika Serikat, dan Pasar Barat: Kanal Geoekonomi Lain

Pola serupa tampak pada hubungan dengan Barat. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mencapai kesepakatan politik tentang **IEU-CEPA**, dan pada September 2025 Uni Eropa mengumumkan bahwa negosiasi CEPA telah

diselesaikan. Ini memperlihatkan bahwa di tengah keanggotaan BRICS, Indonesia justru juga memperdalam integrasi dagangnya dengan Eropa. Uni Eropa sendiri menyajikan CEPA sebagai langkah menuju keterbukaan dan kemitraan, sementara Presiden Prabowo menegaskan bahwa praktis tidak ada lagi perbedaan item utama yang menghambat. ([Trade and Economic Security](#))

Dengan Amerika Serikat, meskipun hubungan dagang dibayangi isu tarif dan defisit, Indonesia juga tetap membuka kanal baru. USTR mencatat total perdagangan barang AS–Indonesia pada 2025 mencapai sekitar **US\$45,8 miliar**. Pada 22 Juli 2025, Gedung Putih mengumumkan kerangka negosiasi **Agreement on Reciprocal Trade** dengan Indonesia. Dalam kerangka itu disebutkan Indonesia akan menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif bagi berbagai produk industri dan pangan AS, sedangkan AS menurunkan tarif resiprokal untuk barang asal Indonesia menjadi 19 persen dari angka yang lebih tinggi sebelumnya. Terlepas dari perdebatan politik-ekonominya, fakta pentingnya adalah Indonesia tetap membuka kanal negosiasi substantif dengan Washington bahkan setelah masuk BRICS. Ini kembali menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia kini tidak dapat dibaca dengan kaca mata “pro-Barat” atau “pro-Timur”. ([United States Trade Representative](#))

#### **4. Australia dan Diversifikasi Keamanan**

Di bidang keamanan, pola multi-alignment tampak bahkan lebih jelas. Pada 6 Februari 2026, Australia dan Indonesia menandatangani **Australia-Indonesia Treaty on Common Security** atau “Jakarta Treaty”. Teks treaty tersebut menegaskan komitmen pada perdamaian, stabilitas kawasan, kedaulatan, non-interference, ASEAN centrality, penyelesaian damai sengketa, dan kerja sama keamanan yang saling menguntungkan. DFAT juga menegaskan bahwa hubungan bilateral telah meningkat menjadi Comprehensive Strategic Partnership, dengan fokus pada ekonomi, konektivitas manusia, keamanan bersama, maritim, dan

kontribusi bagi keamanan serta kemakmuran Indo-Pasifik. Dengan demikian, Indonesia memperkuat hubungan keamanan dengan tetangga yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, tetapi formulasi kerjanya tetap dibuat kompatibel dengan otonomi kebijakan Indonesia. ([DFAT](#))

Selain itu, kerja sama maritim Indonesia–Australia pada 2025 juga diperkuat melalui paket pendanaan baru dan pembentukan **annual Indonesia-Australia Maritime Dialogue**. Ini bukan hanya soal pertahanan keras, tetapi juga domain awareness, law enforcement, sumber daya laut berkelanjutan, dan penegakan UNCLOS. Pola ini menunjukkan bahwa diversifikasi keamanan Indonesia tidak semata-mata diarahkan pada deterrence tradisional, melainkan pada ekosistem keamanan maritim yang lebih luas. ([Prime Minister of Australia](#))

### **5. Amerika Serikat, Super Garuda Shield, dan Interoperabilitas**

Hubungan keamanan dengan Amerika Serikat juga tetap berjalan kuat. Pada Agustus–September 2025, Indonesia dan AS membuka **Super Garuda Shield 2025**, yang oleh pihak AS disebut sebagai latihan multilateral tahunan terbesar antara kedua negara. Laporan militer AS dan sumber lain menyebut ribuan personel dari banyak negara ikut terlibat untuk memperkuat interoperabilitas dan kerja sama keamanan kawasan. Yang menarik, Indonesia tidak membingkai latihan ini sebagai masuk ke aliansi militer formal. Sebaliknya, latihan tersebut diposisikan sebagai penguatan kapabilitas, kerja sama, dan kesiapan. Ini adalah contoh konkret bagaimana Indonesia dapat memperdalam hubungan pertahanan dengan Washington tanpa bergabung ke pakta pertahanan kolektif. ([Army](#))

Di sinilah bebas-aktif bertemu multi-alignment secara paling jelas. Indonesia menjaga **jarak normatif** dari collective defence arrangement, tetapi meningkatkan **kedalaman praktis** kerja sama pertahanan dengan banyak aktor. Chatham House mencatat bahwa Indonesia tetap menghindari bergabung dalam collective defence arrangements dan

tetap tidak mau dipaksa memilih antara Beijing dan Washington. Akan tetapi, rivalitas kedua kekuatan itu membuat posisi tersebut semakin sulit dipertahankan tanpa strategi yang lebih aktif. ([Chatham House](#))

## 6. China: Mitra Ekonomi Sentral, Tetapi Bukan Patron Tunggal

Pembacaan multi-alignment akan keliru bila mengabaikan peran China. Secara ekonomi, China tetap sangat sentral bagi Indonesia. BPS mencatat bahwa pada Januari–Mei 2025, China merupakan tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai **US\$24,25 miliar** atau **22,87 persen**, sekaligus sumber impor nonmigas terbesar sebesar **US\$33,12 miliar** atau **39,92 persen**. BPS juga menyebut defisit nonmigas terbesar Indonesia terjadi dengan China, yakni **US\$8,87 miliar**. Dengan kata lain, kedekatan geoekonomi Indonesia–China adalah fakta struktural, bukan sekadar pilihan taktis. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di bidang investasi, BKPM menyebut bahwa dari 2019 hingga September 2024, investasi China di Indonesia mencapai **US\$34,19 miliar**, sekitar 18 persen dari total investasi asing. Pada masa awal pemerintahan Prabowo, forum bisnis di Beijing bahkan menghasilkan komitmen investasi sekitar **US\$10,07 miliar**. Pada November 2024, Indonesia dan China juga menerbitkan joint statement tentang penguatan comprehensive strategic partnership dan community with a shared future; keduanya menyebut diri sebagai negara berkembang besar, emerging markets, dan kekuatan penting Global South. Ini menunjukkan bahwa dari sisi Beijing, Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang bukan hanya ekonomi, tetapi juga simbolik dalam arsitektur Global South. ([BKPM](#))

Namun, kedekatan ini punya batas. Ketika muncul kontroversi terkait bahasa “overlapping claims” dalam pernyataan bersama 2024, Indonesia menegaskan bahwa ia **tidak mengakui** klaim China di Laut China Selatan dan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional serta tidak memengaruhi kedaulatan dan yurisdiksi

Indonesia di Laut Natuna Utara. Reuters juga melaporkan bahwa pada Desember 2024 Menlu Sugiono menegaskan belum ada kesepakatan spesifik soal area joint development, dan bila ada kerja sama, kedaulatan serta kepentingan nasional Indonesia tetap menjadi prioritas. Di sini terlihat satu hal penting: multi-alignment Indonesia terhadap China **tidak berarti penyesuaian penuh terhadap posisi strategis Beijing**. Hubungan ekonomi bisa diperdalam, tetapi ruang hukum dan kedaulatan tetap dipertahankan. ([Reuters](#))

### **7. India: Mitra Tambahan dalam Geometri Baru**

Dimensi multi-alignment lain adalah pembukaan kanal lebih dalam dengan India. Pada kunjungan negara Presiden Prabowo ke India pada Januari 2025, kedua negara menandatangani serangkaian hasil kerja sama, termasuk di bidang **maritime safety and security**, kesehatan, digital, dan keamanan. Reuters melaporkan kerja sama itu juga menyentuh pertahanan, rantai pasok, dan siber. Artinya, Indonesia tidak memandang India hanya sebagai sahabat historis Konferensi Asia-Afrika, melainkan sebagai salah satu simpul penting dalam jaringan Indo-Pasifik dan Global South. Hubungan dengan India memperluas opsi Indonesia di luar dikotomi AS–China, dan ini adalah ciri khas multi-alignment yang matang. ([MEA India](#))

### **ASEAN Centrality: Apakah Masih Menjadi Jangkar?**

Satu kekhawatiran terbesar dari strategi multi-alignment adalah apakah ia akan menggerus sentralitas ASEAN. Kekhawatiran ini masuk akal, sebab makin banyak forum minilateral dan plurilateral di Indo-Pasifik yang bekerja di luar ASEAN. Namun hingga kini, bukti formal menunjukkan Indonesia masih menempatkan ASEAN sebagai **jangkar legitimasi utama**. ASEAN Community Vision 2045 yang diadopsi pada 26 Mei 2025 menegaskan kembali komitmen pada komunitas berbasis aturan, pentingnya memperkuat persatuan dan centrality ASEAN, serta peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan utama dalam membentuk dan

memimpin arsitektur regional berbasis aturan. Dokumen APSC 2045 juga menyebut bahwa di tengah dinamika geopolitik yang menguat, ASEAN akan terus mendorong arsitektur regional dan memproyeksikan posisinya atas isu regional dan global. ([ASEAN](#))

AOIP juga tetap menjadi referensi kunci. Dokumen AOIP menegaskan ASEAN centrality sebagai prinsip dasar untuk memajukan kerja sama di Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin ASEAN sebagai platform dialog dan implementasi; AOIP secara eksplisit mempromosikan dialog dan kerja sama, bukan rivalitas, serta menekankan keterbukaan, inklusivitas, penghormatan pada kedaulatan, non-intervensi, dan tata kelola berbasis aturan. Bagi Indonesia, inilah formula untuk menghindari jebakan blok. Indonesia dapat berhubungan dengan Quad, China, Amerika Serikat, Jepang, India, Australia, maupun Uni Eropa, tetapi pada level regional ia tetap menginginkan panggung utama dijalankan melalui ASEAN-led mechanisms. ([ASEAN](#))

Meski demikian, tantangannya nyata. Chatham House mencatat bahwa Indonesia khawatir pada meningkatnya minilateral arrangements seperti Quad dan AUKUS karena dianggap berpotensi mengurangi centrality ASEAN dan menggeser preferensi inklusivitas yang selama ini dijaga. Dengan kata lain, multi-alignment hanya akan konsisten dengan bebas-aktif bila Indonesia mampu memastikan bahwa perluasan kemitraan eksternal **tidak menjadikan ASEAN sekadar dekorasi diplomatik**. Jika ASEAN melemah, maka Indonesia kehilangan kendaraan regional terpenting untuk mengamplifikasi suaranya. ([Chatham House](#))

### **Mengapa Pergeseran Ini Terjadi?**

Ada beberapa faktor pendorong utama.

Pertama, **perubahan struktur sistem internasional**. Dunia kini tidak lagi tersusun secara biner. Persaingan bukan hanya militer, tetapi juga tarif, sanksi, pasokan energi, mineral kritis, rantai pasok, pembayaran, data, AI,

*Rudy C Tarumingkeng : Prinsip Bebas-Aktif di Era Baru: Apakah Indonesia Sedang Bergerak ke Multi-Alignment?*

dan regulasi lingkungan. Renstra Kemenlu 2025–2029 sendiri secara lugas menempatkan krisis pangan, energi, finansial, kebijakan tarif AS, dan EUDR sebagai bagian dari tantangan era sekarang. Negara seperti Indonesia tidak lagi bisa hanya mengandalkan satu jalur diplomasi. Ia harus membuka banyak kanal sekaligus agar tidak terjebak pada kerentanan tunggal. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Kedua, **kebutuhan pembangunan nasional**. Indonesia membutuhkan pembiayaan, teknologi, pasar, dan investasi untuk mengejar target menjadi negara maju 2045. Karena sumber-sumber itu tersebar di banyak pusat kekuatan, maka strategi yang paling masuk akal adalah mengakses semuanya. China penting bagi industrialisasi dan hilirisasi; Amerika Serikat dan Uni Eropa penting untuk pasar, teknologi, dan legitimasi standar; OECD penting bagi reformasi kelembagaan; Australia penting bagi maritim, energi, dan pendidikan; India penting bagi manufaktur, keamanan, dan konektivitas Global South. Dari sudut pandang pembangunan, multi-alignment adalah logika diversifikasi portofolio nasional. ([BKPM](#))

Ketiga, **aspirasi middle power**. Analisis Chatham House menyebut elite kebijakan luar negeri Indonesia ingin mempertahankan rule of law, institusi internasional, serta memosisikan Indonesia sebagai rising Asian power. Belfer menambahkan bahwa Indonesia memiliki modal strategis—geografi, sumber daya, ukuran ekonomi, dan kepemimpinan diplomatik—untuk memengaruhi bagaimana kompetisi AS–China dikelola. Untuk middle power seperti Indonesia, multi-alignment bukan kemewahan, tetapi cara agar tidak direduksi menjadi objek persaingan. ([Chatham House](#))

Keempat, **perubahan gaya kepemimpinan**. Sejak Prabowo menjabat Oktober 2024, intensitas diplomasi puncak sangat tinggi. Ada indikasi gaya kebijakan luar negeri menjadi lebih personal, lebih cepat, dan lebih berorientasi eksekusi. Belfer mencatat bahwa di bawah Prabowo

tantangan domestic “leveling up” justru membesar karena personalisasi kebijakan dan perlunya reformasi ekosistem kebijakan strategis. Artinya, peluang multi-alignment memang terbuka, tetapi menuntut kapasitas birokrasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar diplomasi seremonial. ([Belfer Center](#))

### **Peluang dari Multi-Alignment**

Bila dikelola dengan baik, multi-alignment memberi beberapa keuntungan strategis.

Yang pertama adalah **maksimalisasi ruang manuver**. Negara yang aktif di BRICS, OECD, G20, ASEAN, IEU-CEPA, dan kanal bilateral utama memiliki lebih banyak pilihan saat menghadapi tekanan. Misalnya, bila satu pasar menyempit, ada pasar lain; bila satu sumber pembiayaan menurun, ada institusi lain; bila satu mitra menekan, Indonesia masih punya alternatif. Di dunia yang makin terfragmentasi, ruang pilihan adalah bentuk kekuatan. ([OECD](#))

Kedua, multi-alignment meningkatkan **bargaining power**. Indonesia yang diterima di banyak forum bisa tampil sebagai jembatan, broker, atau convenor. Hal ini sejalan dengan penekanan pemerintah pada multilateralisme sebagai instrumen perluasan ruang strategis Indonesia. Dalam skenario ideal, Indonesia tidak hanya menjadi peserta forum, tetapi juga pembentuk agenda—misalnya pada isu transisi energi, pendanaan pembangunan, stabilitas rantai pasok, atau tata kelola AI. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Ketiga, strategi ini dapat memperkuat **ketahanan nasional**. Dalam dokumen Renstra, diplomasi 2025–2029 bahkan dikaitkan dengan diplomasi ketahanan nasional. Artinya, politik luar negeri tidak lagi dipandang semata sebagai urusan representasi, melainkan sebagai instrumen untuk mengamankan ekonomi, energi, pangan, dan posisi strategis Indonesia. Dari perspektif itu, multi-alignment adalah cara

membangun ketahanan melalui jaringan. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

### Risiko dan Kontradiksi

Tetapi manfaat itu datang bersama risiko.

Risiko pertama adalah **overstretch**. Semakin banyak forum, perjanjian, dan kanal kerja sama yang diikuti, semakin besar kebutuhan koordinasi, konsistensi, dan kapasitas negosiasi. Lowy dan CSIS sama-sama menyoroti bahwa agenda luar negeri Prabowo yang ambisius berpotensi menabrak keterbatasan sumber daya diplomatik dan kebutuhan strategi yang lebih jelas. Secara akademik, inilah alasan mengapa beberapa penulis menyebut posisi Indonesia baru sampai pada partial multi-alignment, bukan full multi-alignment. ([Lowy Institute](#))

Risiko kedua adalah **ambiguity trap**. Bila Indonesia terlalu banyak membuka jalur tanpa memperjelas prioritas, para mitra bisa membaca kebijakan Indonesia secara berbeda-beda. China bisa menganggap Indonesia lebih dekat karena BRICS dan kerja sama mineral; Barat bisa menganggap Indonesia lebih condong ke mereka karena OECD dan CEPA; ASEAN bisa menganggap Indonesia mulai terlalu global dan kurang regional. Ambiguitas terkadang berguna secara taktis, tetapi jika berlebihan dapat menggerus kredibilitas strategis. ([The Strategist](#))

Risiko ketiga adalah **erosi sentralitas ASEAN**. Bila Indonesia terlalu sibuk pada forum-forum besar lain, ASEAN bisa kehilangan energi politiknya. Padahal ASEAN adalah multiplier utama pengaruh Indonesia. Karena itu, pertanyaannya bukan apakah Indonesia boleh aktif di BRICS atau OECD, melainkan apakah aktivitas itu menambah bobot ASEAN atau justru menggesernya. Dokumen ASEAN 2045 jelas meminta penguatan centrality, kapasitas institusional, dan responsivitas terhadap tantangan baru; bila Indonesia gagal menopangnya, maka strategi multi-

alignment bisa menjadi kontraproduktif terhadap kepentingan regional jangka panjangnya sendiri. ([ASEAN](#))

Risiko keempat adalah **ketegangan antara ekonomi dan kedaulatan**, terutama terhadap China. Indonesia membutuhkan investasi dan pasar China, tetapi juga harus tegas pada Natuna, UNCLOS, dan integritas yuridis posisinya di Laut China Selatan. Episode “overlapping claims” menunjukkan betapa satu frasa diplomatik bisa memicu kekhawatiran bahwa kepentingan ekonomi telah melampaui kejelasan posisi hukum. Di sinilah multi-alignment diuji: apakah ia mampu menjaga keterbukaan ekonomi tanpa mengaburkan garis merah kedaulatan. ([Reuters](#))

Risiko kelima adalah **ketergantungan asimetris yang terselubung**. Secara formal Indonesia bisa mengaku bebas dan tidak berpihak, tetapi jika satu mitra terlalu dominan dalam perdagangan, investasi, teknologi, atau pembiayaan, maka kebebasan substantif dapat menyempit. Data BPS yang menunjukkan dominasi China dalam ekspor dan impor Indonesia menjadi pengingat bahwa diversifikasi bukan slogan, melainkan kebutuhan strategis nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

### **Jadi, Apakah Indonesia Sedang Bergerak ke Multi-Alignment?**

Bila pertanyaannya dijawab secara tegas, maka jawabannya adalah: **ya, Indonesia sedang bergerak ke multi-alignment, tetapi bukan sebagai pengganti bebas-aktif; melainkan sebagai bentuk kontemporer dari bebas-aktif itu sendiri**. Pergeseran ini bersifat **selektif, pragmatis, dan parsial**. Ia bukan alignment dalam arti klasik—Indonesia tidak masuk pakta pertahanan, tidak memutuskan hubungan dengan salah satu pusat kekuatan, dan tidak mengadopsi logika bloc politics. Akan tetapi, ia juga bukan non-alignment pasif ala retorika lama. Indonesia kini aktif membangun kedekatan simultan dengan Global South, OECD, Barat, mitra regional, dan kekuatan Indo-Pasifik lain, dengan tujuan memperbesar opsi dan memperkuat otonomi strategis. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Dengan kata lain, yang berubah bukan **asas dasarnya**, melainkan **modus operandinya**. Dulu bebas-aktif lebih banyak dibaca sebagai menjaga jarak dari blok. Kini bebas-aktif semakin tampak sebagai kemampuan untuk **merawat banyak alignment terbatas tanpa jatuh ke satu alignment eksklusif**. Inilah mengapa istilah yang paling tepat mungkin bukan “peralihan dari bebas-aktif ke multi-alignment”, tetapi “**transformasi bebas-aktif menjadi strategi multi-alignment parsial**”. Rumusan ini lebih akurat secara empiris maupun normatif. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

## **Penutup**

Era baru menuntut pembacaan baru atas bebas-aktif. Dunia yang dihadapi Indonesia saat ini bukan lagi dunia Bandung 1955, bukan pula dunia bipolar Perang Dingin. Ia adalah dunia yang dipenuhi tumpang tindih lembaga, fragmentasi ekonomi, kompetisi teknologi, krisis pasokan, politik standar, dan ketidakpastian keamanan. Dalam dunia seperti itu, kebijakan luar negeri yang hanya mengandalkan slogan non-blok tanpa perluasan kapasitas akan mudah menjadi defensif dan reaktif. Karena itu, Indonesia tampak sedang mengembangkan strategi yang lebih elastis: masuk BRICS tanpa meninggalkan OECD; memperdalam kerja sama dengan Australia tanpa menjadi sekutu formal; bernegosiasi dengan AS dan Uni Eropa sambil tetap mengelola hubungan erat dengan China; tetap mempromosikan ASEAN centrality sambil merentang jejaring global yang lebih luas. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Maka, masa depan bebas-aktif Indonesia tampaknya bukan pada kemurnian doktrin yang statis, melainkan pada **kecerdasan strategis** untuk menjaga kedaulatan pilihan di tengah banyak tarikan. Jika berhasil, Indonesia dapat tampil sebagai middle power yang benar-benar berpengaruh: bukan pengikut blok, bukan pula penonton pasif,

melainkan perancang ruang geraknya sendiri. Tetapi jika gagal—karena kapasitas diplomatik terbatas, prioritas kabur, atau kepentingan ekonomi mengalahkan konsistensi normatif—maka multi-alignment bisa berubah dari sumber leverage menjadi sumber kebingungan. Di situlah tantangan besar Indonesia beberapa tahun ke depan: menjadikan banyak keterhubungan sebagai alat memperkuat otonomi, bukan sebagai jalan menuju keterikatan baru yang lebih halus. ([Belfer Center](#))

Berikut **glosarium** dan **daftar pustaka** dalam dua format: **APA 7th** dan **Chicago 17th (Notes-Bibliography)**. Fokus pada istilah dan sumber yang paling relevan dengan pembahasan tentang **bebas-aktif, multi-alignment, ASEAN centrality, BRICS, OECD, dan dinamika hubungan Indonesia dengan kekuatan-kekuatan besar**. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

## **Glosarium**

### **ASEAN Centrality**

Prinsip bahwa ASEAN harus tetap menjadi pusat penggerak arsitektur kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, terutama melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN seperti EAS, ARF, dan forum terkait. ([ASEAN](#))

### **ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)**

Dokumen visi ASEAN yang menekankan keterbukaan, inklusivitas, dialog, kerja sama, dan sentralitas ASEAN dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik. ([ASEAN](#))

### **Bebas-Aktif**

Doktrin politik luar negeri Indonesia yang berarti bebas menentukan sikap tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu, namun aktif berkontribusi dalam penciptaan perdamaian, kerja sama, dan ketertiban dunia. Doktrin ini tetap ditegaskan dalam dokumen resmi diplomasi Indonesia 2025–2029. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

### **BRICS**

Forum kerja sama negara-negara berkembang besar yang kini mencakup Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta anggota baru termasuk Indonesia. Keanggotaan Indonesia dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas ruang strategis global. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

### **Collective Defence Arrangement**

Pengaturan pertahanan kolektif formal, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap seluruh anggota. Indonesia sejauh ini tetap menghindari model aliansi seperti ini. ([DFAT](#))

### **Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)**

Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, fasilitasi perdagangan, dan aspek regulasi lainnya. Dalam konteks ini, IEU-CEPA menjadi contoh kanal geoekonomi Indonesia dengan Uni Eropa. ([Trade and Economic Security](#))

### **Geoekonomi (Geoeconomics)**

Penggunaan instrumen ekonomi—perdagangan, investasi, tarif, sanksi, rantai pasok, mineral strategis—untuk mencapai tujuan kekuasaan dan pengaruh politik. Istilah ini penting untuk menjelaskan mengapa politik luar negeri kini tidak hanya berbicara tentang militer. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

### **Global South**

Kelompok longgar negara-negara berkembang yang sering mendorong reformasi tata kelola global agar lebih representatif, adil, dan tidak

didominasi negara industri maju. Indonesia kian aktif memposisikan diri di ruang ini. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

### **Hedging**

Strategi negara untuk mengurangi risiko dengan membina hubungan dengan beberapa kekuatan yang saling bersaing, sehingga tidak terlalu bergantung pada satu pihak saja. Dalam literatur, hedging sering dipakai untuk menjelaskan perilaku Indonesia sebelum istilah multi-alignment makin populer. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

### **IEU-CEPA**

Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, yaitu perjanjian ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa yang mencapai terobosan politik pada Juli 2025 dan finalisasi negosiasi pada September 2025. ([Trade and Economic Security](#))

### **Indo-Pasifik**

Ruang geopolitik yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, mencakup dimensi keamanan, perdagangan, maritim, teknologi, dan konektivitas. Bagi Indonesia, kawasan ini penting tetapi harus dikelola dengan prinsip inklusif dan tidak konfrontatif. ([ASEAN](#))

### **Middle Power**

Negara yang bukan superpower, tetapi memiliki kapasitas diplomatik, ekonomi, geografis, atau normatif untuk memengaruhi tata kelola kawasan dan global. Indonesia sering dibahas dalam kategori ini. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

### **Multi-Alignment**

Strategi menjalin hubungan substantif dengan banyak pusat kekuatan sekaligus, termasuk yang saling bersaing, tanpa komitmen eksklusif pada satu blok. Dalam konteks Indonesia, sebagian akademisi menyebut praktik terkini sebagai **partial multi-alignment**. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

### **Multilateralisme**

Pendekatan kerja sama internasional melalui institusi, forum, dan aturan bersama yang melibatkan banyak negara. Indonesia terus menegaskan multilateralisme sebagai alat memperluas ruang gerak strategisnya.

([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

### **New Development Bank (NDB)**

Bank pembangunan multilateral yang terkait dengan BRICS dan ditujukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan infrastruktur di negara-negara berkembang. Indonesia resmi memutuskan bergabung pada Maret 2025. ([Setneg](#))

### **Non-Alignment**

Sikap untuk tidak bergabung dengan blok kekuatan besar tertentu. Dalam era kini, konsep ini sering dianggap tidak lagi cukup untuk menjelaskan praktik diplomasi Indonesia yang semakin kompleks.

([Cambridge University Press & Assessment](#))

### **OECD Accession**

Proses akses Indonesia menuju keanggotaan OECD, yang mensyaratkan penyesuaian kebijakan, legislasi, dan tata kelola dengan standar OECD. Ini menandai orientasi Indonesia pada reformasi kelembagaan dan kredibilitas global. ([OECD](#))

### **Otonomi Strategis**

Kemampuan negara untuk mempertahankan kebebasan mengambil keputusan dalam isu-isu utama tanpa dikendalikan secara berlebihan oleh kekuatan eksternal. Ini adalah inti praktis dari bebas-aktif di era baru. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

### **Partial Multi-Alignment**

Istilah akademik untuk menggambarkan bahwa Indonesia memang bergerak ke pola multi-alignment, tetapi belum sepenuhnya karena keterbatasan kapasitas, kalkulasi ancaman, dan kehati-hatian strategis.

([Cambridge University Press & Assessment](#))

### **Reciprocal Trade Agreement**

Kerangka perjanjian perdagangan timbal balik yang dinegosiasikan Indonesia dan Amerika Serikat pada 2025, dengan unsur pembukaan tarif dan akses pasar. ([The White House](#))

### **Rule-Based Order**

Tatanan internasional yang menekankan aturan, norma, hukum internasional, dan mekanisme institusional sebagai dasar hubungan antarnegara. ASEAN dan Indonesia terus menyebut pentingnya tatanan seperti ini. ([ASEAN](#))

### **Super Garuda Shield**

Latihan militer multilateral tahunan yang melibatkan Indonesia, Amerika Serikat, dan berbagai mitra lain, sebagai bentuk peningkatan interoperabilitas dan kerja sama keamanan tanpa menjadikan Indonesia anggota aliansi formal. ([Reuters](#))

---

### **Daftar Pustaka — Format APA 7th**

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *ASEAN 2045: Our shared future*. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *ASEAN Community Vision 2045*. ([ASEAN](#))

Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. (2026, February 6). *Australia-Indonesia Treaty on Common Security*. ([DFAT](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, July 1). *Indonesia's trade balance remains positive*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

*Rudy C Tarumingkeng : Prinsip Bebas-Aktif di Era Baru: Apakah Indonesia Sedang Bergerak ke Multi-Alignment?*

Belfer Center for Science and International Affairs. (2025). *Active alignment: How Indonesia can shape the U.S.-China strategic competition*. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

European Commission. (2025, July 13). *EU and Indonesia choose openness and partnership with political agreement on CEPA*. ([European Commission](#))

European Commission. (2025, September 23). *EU and Indonesia conclude negotiations on free trade agreement*. ([Trade and Economic Security](#))

Government of Brazil. (2025, January 6). *Brazil announces Indonesia as full member of BRICS*. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, January 9). *Transkrip Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2025*. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026). *Transkrip Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2026*. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029*. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

OECD. (2025, June 3). *Indonesia reaches key milestones in OECD accession process*. ([OECD](#))

Reuters. (2024, November 11). *Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China, despite deal*. ([Reuters](#))

Reuters. (2024, December 2). *Indonesia yet to agree joint development areas with Beijing in South China Sea, minister says*. ([Reuters](#))

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, March 25). *Indonesia resmi gabung NDB, Presiden Prabowo Subianto: Langkah strategis untuk percepatan transformasi nasional.* ([Setneg](#))

U.S. Trade Representative. (2026). *Indonesia.* ([United States Trade Representative](#))

The White House. (2025, July 22). *Joint statement on framework for United States-Indonesia agreement on reciprocal trade.* ([The White House](#))

Wicaksana, I. G. W., & Yakti, P. D. (2025). Indonesia's new partial multialignment strategy: A conceptual and empirical analysis. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 13(2), 264–281. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

---

### **Daftar Pustaka — Format Chicago 17th (Notes-Bibliography)**

Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. 2019. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN 2045: Our Shared Future*. 2025. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN Community Vision 2045*. 2025. ([ASEAN](#))

Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. *Australia-Indonesia Treaty on Common Security*. February 6, 2026. ([DFAT](#))

Badan Pusat Statistik. "Indonesia's Trade Balance Remains Positive." July 1, 2025. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Belfer Center for Science and International Affairs. *Active Alignment: How Indonesia Can Shape the U.S.-China Strategic Competition*. 2025. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

European Commission. "EU and Indonesia Choose Openness and Partnership with Political Agreement on CEPA." July 13, 2025. ([European Commission](#))

European Commission. "EU and Indonesia Conclude Negotiations on Free Trade Agreement." September 23, 2025. ([Trade and Economic Security](#))

Government of Brazil. "Brazil Announces Indonesia as Full Member of BRICS." January 6, 2025. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Transkrip Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2025." January 9, 2025. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Transkrip Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2026." 2026. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029*. 2025. ([Ministry of Foreign Affairs of Indonesia](#))

OECD. "Indonesia Reaches Key Milestones in OECD Accession Process." June 3, 2025. ([OECD](#))

Reuters. "Indonesia Says It Has No Overlapping South China Sea Claims with China, Despite Deal." November 11, 2024. ([Reuters](#))

Reuters. "Indonesia Yet to Agree Joint Development Areas with Beijing in South China Sea, Minister Says." December 2, 2024. ([Reuters](#))

Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Indonesia Resmi Gabung NDB, Presiden Prabowo Subianto: Langkah Strategis untuk Percepatan Transformasi Nasional." March 25, 2025. ([Setneg](#))

The White House. "Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade." July 22, 2025. ([The White House](#))

U.S. Trade Representative. "Indonesia." 2026. ([United States Trade Representative](#))

Wicaksana, I. G. W., and Probo Darono Yakti. "Indonesia's New Partial Multialignment Strategy: A Conceptual and Empirical Analysis." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 13, no. 2 (2025): 264–281. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

**Catatan kecil:** dalam praktik penulisan, **APA 7** lebih sering dipakai untuk artikel ilmiah manajemen, ilmu sosial, dan pendidikan, sedangkan **Chicago** sering dipakai untuk kajian humaniora, sejarah, dan esai reflektif. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 4 Maret 2026  
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a7f5b8-604c-8399-8631-411c7e7fbb83>